

REPRESENTASI KRITIK TERHADAP KEKUASAAN DAN PERLAWANAN DIGITAL DALAM VIDIO TIKTOK “INDONESIA GELAP”

Luh Sulasti Ningsih^{1*}; Ketut Putu Suardana²; Rieka Yulita Widaswara³

^{1,2,3} Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Mataram, Indonesia;

luhsulastiningsih@gmail.com¹, ikp31suardana@gmail.com², riekawidaswara@gmail.com³

*Correspondence : luhsulastiningsih@gmail.com

ABSTRAK

Video TikTok “Indonesia Gelap” yang dipublikasikan oleh akun @Voidotid muncul di tengah meningkatnya ketegangan sosial-politik di Indonesia, seperti kenaikan biaya pendidikan, ketimpangan ekonomi, represi terhadap demonstrasi mahasiswa, serta dominasi militer dalam wacana publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana video tersebut merepresentasikan kritik terhadap kekuasaan dan bagaimana publik memberikan respons melalui ruang digital. Dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis isi, serta berlandaskan teori encoding/decoding dari Stuart Hall, penelitian ini menelaah simbol visual, narasi, dan tagar yang digunakan dalam menyampaikan pesan resistensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa video menggambarkan negara sebagai entitas yang abai terhadap suara rakyat dan memperkuat narasi dominasi melalui pembingkai visual dan simbol ideologis. Respons publik pun terbagi ke dalam tiga kategori decoding yakni dominan, negosiasi, dan oposisi, menunjukkan dinamika pemaknaan ulang oleh audiens. Temuan ini menegaskan bahwa TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai arena kontestasi makna, ekspresi ideologis, dan perlawanan digital terhadap wacana kekuasaan. Penelitian ini berkontribusi dalam penguatan kajian komunikasi politik digital serta memperkaya pemahaman tentang representasi simbolik dan keterlibatan publik dalam isu sosial-politik kontemporer.

Kata kunci

Enkoding/ Dekoding, Kekuasaan, Perlawanan Digital, Representasi, TikTok

ABSTRACT

The TikTok video “Indonesia Gelap,” published by the @Voidotid account, emerged amidst escalating socio-political tensions in Indonesia, including rising tuition fees, economic inequality, suppression of student demonstrations, and the dominance of military narratives in public discourse. This study aims to examine how the video constructs a critique of power and how audiences respond to it through digital spaces. Employing a qualitative content analysis approach and drawing on Stuart Hall’s encoding/decoding theory, this research investigates the visual symbols, narratives, and hashtags used to convey resistance messages. The findings indicate that the video frames the state as an entity that disregards public voices and reinforces domination through ideological symbols and visual framing. Public responses are categorized into three decoding positions namely dominant, negotiated, and oppositional, reflecting the contested nature of meaning production in digital media. This study affirms that TikTok serves not merely as an entertainment platform but also as a site for ideological contestation, symbolic resistance, and digital opposition to dominant narratives. It contributes to the advancement of digital political communication studies and deepens our understanding of symbolic representation and public engagement in contemporary socio-political issues.

Keywords

Digital Resistance, Encoding/ Decoding, Power, Representation, TikTok

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara individu menerima, mengelola, dan memproduksi informasi. Era digital yang ditandai dengan kehadiran internet dan perangkat canggih yang saling terhubung telah menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih terbuka, cepat, dan interaktif (Wibowo, 2023). Dalam lanskap baru ini, media sosial muncul sebagai ruang partisipasi publik yang signifikan. Individu kini tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga produsen aktif informasi, yang secara langsung membentuk dinamika komunikasi sosial (Abdillah, 2022).

Salah satu media sosial yang mengalami lonjakan popularitas secara drastis dalam beberapa tahun terakhir adalah TikTok. Dengan ciri khas berupa konten yang singkat, padat, dan didominasi visual, TikTok berhasil menarik minat, terutama dari kalangan muda. Tampilan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur-fitur interaktif mendorong partisipasi aktif, menjadikan TikTok lebih dari sekadar sarana hiburan, ia juga berfungsi sebagai forum diskusi publik yang aktif dan progresif (Firdaus et al., 2023). Saat ini, TikTok telah menjadi saluran penting untuk menyampaikan berbagai narasi, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan ranah sosial maupun politik (Firdaus et al., 2023).

Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna TikTok terus menunjukkan tren peningkatan. Data dari laporan *We Are Social* edisi Oktober 2023 mencatat bahwa terdapat sekitar 106,51 juta pengguna aktif TikTok di Indonesia, menjadikannya sebagai negara dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak kedua secara global (Annur, 2023). Besarnya angka ini menunjukkan bahwa TikTok kini telah menjadi elemen krusial dalam lanskap digital masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Dengan meningkatnya tingkat literasi digital, platform ini telah dimanfaatkan secara luas, tidak hanya oleh publik umum, tetapi juga oleh aktivis, jurnalis akar rumput, hingga kelompok masyarakat sipil dalam menyuarakan pendapat serta mendorong gerakan sosial secara kolektif.

Kondisi ini mencerminkan bahwa platform media sosial seperti TikTok tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen yang signifikan dalam memengaruhi opini publik dan mendorong gerakan sosial. Inovasi dalam cara penyampaian pesan membuat konten bermuatan politik di media sosial mampu membentuk kecenderungan masyarakat, hingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di ranah politik (Kamindang & Amijaya, 2024). TikTok, dengan keunggulan dalam distribusi informasi yang cepat dan bersifat interaktif, menghadirkan ruang percakapan politik yang lebih inklusif, hidup, dan mengundang partisipasi publik secara lebih luas (Albarzand, 2024).

Salah satu contoh menarik dari pemanfaatan TikTok dalam menyuarakan isu sosial-politik adalah akun Voidotid, bagian dari PT Voice of Indonesia (VOI). Akun ini konsisten memproduksi konten bertema sosial-politik dengan pendekatan visual khas TikTok. Salah satu video unggulannya, berjudul "Indonesia Gelap", menyoroti aksi unjuk rasa Koalisi Masyarakat Sipil dan BEM Seluruh Indonesia. Hingga 10 Juli 2024, video berdurasi 8 menit 43 detik ini telah ditonton 8.372 kali, mendapatkan 204 tanda suka, dibagikan 56 kali, dan menerima 12 komentar. Meski berdurasi relatif panjang untuk standar TikTok, video ini tetap menarik perhatian berkat narasi visual yang kuat, emosional, dan penggunaan elemen seperti kutipan berita serta tagar viral #IndonesiaGelap.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana video TikTok “Indonesia Gelap” merepresentasikan kritik terhadap kekuasaan, serta bagaimana bentuk perlawanan digital dimunculkan melalui respons publik terhadap video tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana video “Indonesia Gelap” merepresentasikan kritik terhadap kekuasaan melalui konstruksi visual dan simbolik, serta untuk memahami bagaimana bentuk perlawanan digital muncul dalam respons publik terhadap video tersebut.

Sejumlah studi terdahulu mengindikasikan bahwa platform media sosial, terutama TikTok, memiliki kontribusi yang signifikan dalam dinamika komunikasi politik di era digital saat ini. Penelitian oleh Akbar (2025) menganalisis bagaimana citra politik Anies Baswedan dibentuk melalui konten di akun TikTok resminya. Dengan menggunakan analisis semiotika Peirce, Akbar menemukan bahwa citra pemimpin yang progresif dan inklusif dikomunikasikan lewat simbol visual dan gaya komunikasi anak muda. Penelitian ini relevan karena sama-sama melihat TikTok sebagai ruang komunikasi politik. Namun, pendekatan penelitian ini berbeda yaitu jika Akbar fokus pada produksi makna oleh kreator, maka penelitian ini juga melihat bagaimana pesan tersebut diterima dan dimaknai oleh audiens, menggunakan teori *encoding-decoding* Stuart Hall.

Sementara itu, Juleha et al., (2024) menyoroti peran media sosial dalam membentuk opini publik dan partisipasi politik. Media sosial dipandang sebagai ruang interaksi politik yang cepat namun rawan polarisasi. Penelitian ini memperkuat dasar bahwa media sosial, termasuk TikTok, adalah ruang pertarungan makna politik. Penelitian ini melanjutkan dengan fokus pada satu konten spesifik dan *respons* publik terhadapnya.

Penelitian Ramkita and Muslim (2023) menunjukkan bagaimana partai politik menggunakan media sosial secara strategis untuk membangun komunikasi dengan publik. Temuan mereka menegaskan pentingnya media sosial sebagai alat pembentukan opini. Bedanya, penelitian ini melihat bagaimana pesan dari entitas non-partisan seperti @Voidotid dikodekan dan ditafsirkan *audiens* di TikTok. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial adalah arena penting dalam komunikasi politik digital. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian sebelumnya dengan menelaah secara mendalam bagaimana pesan politik di TikTok diproduksi dan diterima oleh publik.

Untuk mendalami dinamika ini secara lebih menyeluruh, penting kiranya menelaah sejumlah konsep kunci yang dapat menjadi fondasi teoretis dalam memahami bagaimana TikTok berperan sebagai medium representasi sosial-politik, bagaimana pesan dikonstruksi dalam media digital, serta bagaimana publik memberikan *respons* terhadapnya. Konsep-konsep berikut akan memperkaya landasan pemikiran dalam menelaah produksi dan penerimaan makna dalam video “Indonesia Gelap”.

Representasi dalam media bukanlah proses yang netral, melainkan konstruksi sosial yang sarat dengan ideologi, nilai, dan kekuasaan. Media tidak menyampaikan realitas secara langsung, tetapi membentuknya melalui bahasa, simbol, dan narasi (Hall, 1997). Representasi pesan politik generasi milenial, menurut Wasilah et al.,(2021), sangat dipengaruhi oleh kekuatan media yang berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat. Dalam konteks ini, media sosial seperti TikTok turut berperan aktif dalam menciptakan makna sosial melalui simbol visual, teks, musik, dan algoritma (Baskoro et al., 2023). Video “Indonesia Gelap” merupakan contoh nyata bagaimana representasi tersebut bekerja, dengan menampilkan demonstrasi, cuplikan berita, dan ekspresi

simbolik yang sarat kritik sosial-politik. Mengacu pada teori Barthes (1977), representasi ini dapat dianalisis melalui makna denotatif dan konotatif yang menyiratkan muatan ideologis dan sikap kritis terhadap kekuasaan.

Media berperan dalam membentuk pandangan publik melalui penetapan dan pembedaan isu, yang memengaruhi persepsi sosial dan politik masyarakat (Syafrina, 2022). Proses ini dikenal dalam kajian komunikasi sebagai mekanisme agenda setting dan framing. Media sosial kemudian menghadirkan ruang demokrasi baru yang bersifat partisipatif dan horizontal (Ramkita & Muslim, 2023), serta dalam konteks Indonesia, menjadi alat kontrol warga terhadap negara (Kementerian Perdagangan RI, 2014). Lebih lanjut, menurut Fachlevi et al., (2024), media sosial tidak hanya menjadi ruang untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga dapat merefleksikan dinamika perubahan sosial yang sedang terjadi di tengah publik.

Respons publik terhadap media sosial bersifat aktif dan partisipatif. Sesuai dengan teori encoding/decoding yang dikemukakan oleh Hall (1973), makna tidak diterima secara pasif, melainkan ditafsirkan secara aktif oleh khlayak dalam tiga posisi: dominan, negosiasi, atau oposisi. Interaksi publik melalui komentar, likes, atau remix mencerminkan dinamika decoding ini (Baskoro et al., 2023). Dalam konteks ini, Purwaningsih dan Sabardila (2020) menyatakan bahwa unggahan publik figur di media sosial kerap memicu berbagai respons netizen yang berdampak pada citra mereka di ruang publik. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan RI (2014) menyatakan bahwa media sosial memungkinkan pengguna tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga secara aktif merespons, memodifikasi, dan menyebarkan konten, sehingga tercipta proses produksi dan distribusi makna yang bersifat partisipatif dan kolektif.

Dalam konteks video “Indonesia Gelap”, publik menunjukkan posisi yang beragam meliputi mendukung, menegosiasikan, atau menolak pesan yang disampaikan. Dengan memahami konsep tersebut, penelitian ini menempatkan TikTok sebagai ruang publik digital tempat konten sosial-politik diproduksi, direpresentasikan, dan ditafsirkan secara aktif oleh publik. Konsep ruang publik digital menjadi penting dalam konteks ini, sebab media sosial telah bertransformasi menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya diskusi kritis tentang kepentingan umum. Dalam perspektif Habermas (1989), ruang publik adalah sarana terbentuknya kesepakatan rasional demi praktik demokrasi. Media sosial seperti TikTok berperan sebagai kanal terbuka untuk partisipasi warga dalam diskursus publik (Surokim, 2017), serta mendistribusikan informasi secara horizontal dan memungkinkan setiap orang memiliki peran yang sama dalam menyampaikan dan menerima informasi (Abdillah, 2022). TikTok memungkinkan artikulasi aspirasi publik yang dapat memengaruhi wacana dan kebijakan (Kementerian Perdagangan RI, 2014).

Untuk menelaah bagaimana pesan dalam video “Indonesia Gelap” diproduksi dan dimaknai oleh publik, penelitian ini menggunakan teori *encoding/decoding* dari Hall (1973) yang memandang komunikasi media sebagai proses sirkular yang terdiri dari produksi, sirkulasi, konsumsi, dan reproduksi makna. Dalam kerangka ini, pesan tidak hanya dikodekan oleh pembuat konten, tetapi juga diuraikan secara aktif oleh *audiens* sesuai konteks sosial, budaya, dan ideologis mereka. Hall menekankan bahwa pemaknaan tidak bersifat tunggal melainkan publik bisa menerima makna dominan, menegosiasikannya, atau menolaknya sepenuhnya. Hal ini mencerminkan posisi *decoding* dominan-hegemonik, negosiasi, dan oposisi. Teori ini relevan dan menjadi teori

utama untuk memahami bagaimana pesan sosial-politik dalam video TikTok “Indonesia Gelap” diproduksi dan dimaknai ulang oleh publik melalui *respons* dan interaksi digital.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi politik digital, khususnya dalam analisis representasi visual, simbolik, dan respons audiens terhadap wacana kekuasaan di media sosial. Dari sisi aplikatif, temuan penelitian ini berpotensi menjadi acuan bagi pembuat konten, pendidik, serta masyarakat luas dalam memahami strategi penyampaian kritik terhadap kekuasaan secara kreatif melalui media digital, serta dalam mendorong literasi media yang reflektif dan kritis terhadap dominasi narasi negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi, yang memungkinkan pembacaan mendalam terhadap representasi kritik terhadap kekuasaan serta bentuk-bentuk perlawanan digital yang muncul melalui respons publik terhadap video “Indonesia Gelap” di TikTok.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan fokus pada teknik analisis isi. Pemilihan pendekatan ini disesuaikan dengan orientasi utama penelitian, yaitu untuk menelusuri dan menafsirkan makna yang terdapat dalam video TikTok berjudul “Indonesia Gelap” yang mengangkat kritik terhadap kekuasaan dan bentuk perlawanan digital. Metode kualitatif dianggap tepat karena tidak bergantung pada penggunaan data statistik atau proses kuantifikasi dalam memperoleh temuan, melainkan menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci dalam aktivitas pengumpulan dan analisis data, dengan perhatian utama pada makna dan nilai-nilai yang melekat dalam realitas sosial yang dikaji (Agustini et al., 2023). Dalam konteks ini, analisis isi kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi pesan-pesan eksplisit maupun implisit dalam media digital, terutama dalam membedah simbolisme, narasi resistensi, dan representasi ideologis dalam konteks budaya dan kekuasaan tertentu.

Objek utama penelitian adalah video TikTok “Indonesia Gelap” dari akun @Voidotid. Video lain dari akun serupa juga diamati untuk triangulasi sumber. Menurut Abdussamad (2021), triangulasi sumber menguji kredibilitas data dengan membandingkan pandangan dari berbagai pihak dan mengkategorikan perbedaannya, sehingga memperoleh gambaran lebih utuh. Komentar publik pada video juga dianalisis, dengan menyamakan identitas akun demi menjaga etika penelitian.

Adegan dipilih berdasarkan elemen simbolik yang memuat kritik terhadap kekuasaan, seperti demonstrasi mahasiswa, narasi kenaikan UKT, potongan berita, dan simbol negara, dengan mempertimbangkan kekuatan naratif dan muatan ideologis. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi elemen visual utama seperti gambar dan adegan kunci, narasi atau teks yang ditampilkan dalam video, elemen audio seperti musik atau efek suara, serta komentar publik sebagai bentuk *decoding* dan *respons audiens* terhadap pesan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan. Menurut Hasanah (2022) observasi nonpartisipan yaitu metode di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial subjek penelitian, melainkan hanya mengamati dan mencatat informasi secara objektif tanpa melakukan intervensi. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap representasi pesan yang dibangun oleh kreator serta tanggapan publik secara lebih netral. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan

untuk mencatat dan mengorganisasi isi video serta komentar publik pada unggahan video “Indonesia Gelap”.

Triangulasi sumber dilakukan dengan menelaah konten pendukung dari kanal @Voidotid di platform lain seperti YouTube serta artikel-artikel dari situs resmi VOI.id, untuk melihat konsistensi pesan lintas media. Meskipun data ini tidak menjadi fokus utama, keberadaannya memperkuat temuan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang saling melengkapi.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis dengan menggabungkan dua pendekatan utama yaitu teori *encoding/decoding* dari Hall dan semiotika Barthes. Teori *encoding/decoding* digunakan untuk menganalisis bagaimana pesan di konstruksi dan di tafsirkan. Hall (1973) menyatakan bahwa makna pesan media dibentuk melalui proses produksi (*encoding*) dan kemudian ditafsirkan ulang oleh *audiens* dalam proses *decoding*, yang dapat bersifat *dominant-hegemonic*, negosiasi, atau oposisi. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana pesan-pesan kritik terhadap kekuasaan dikonstruksi oleh kreator video melalui unsur visual, teks, dan audio sebagai bentuk *encoding*, serta bagaimana *audiens* merespons dan menafsirkan pesan tersebut melalui komentar, *likes*, dan *share*.

Untuk mengkaji struktur tanda yang muncul dalam visual, teks, dan audio video, penelitian ini juga menggunakan pendekatan semiotika Barthes. Mengacu pada teori Barthes (1977), representasi visual dapat dianalisis melalui dua tingkat utama makna yakni denotatif (makna literal atau permukaan) dan konotatif (makna simbolik atau emosional). Konotasi inilah yang kemudian membuka jalan bagi pembentukan mitos (struktur makna yang menyamakan ideologi tertentu sebagai sesuatu yang alami dan tidak terbantahkan. Dalam konteks video “Indonesia Gelap”, pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana elemen seperti gambar demonstrasi, teks kutipan media, pakaian massa aksi, dan musik dramatis menciptakan konotasi ideologis berupa kritik terhadap negara dan solidaritas terhadap gerakan mahasiswa.

Adapun Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi pengorganisasian data, pemecahan data ke dalam unit-unit makna, pengelompokan berdasarkan tema, pencarian pola-pola visual dan tekstual yang muncul, dan penafsiran makna berdasarkan konteks wacana kekuasaan dan ekspresi digital masyarakat. Konteks ini mencakup isu-isu seperti demonstrasi mahasiswa, kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta tuntutan reformasi dan keadilan sosial. Tahapan ini mengacu pada metode analisis kualitatif seperti yang dijelaskan oleh Mouw (2022), yaitu mengatur, memecah, mengkode, mensintesis, mencari pola, dan melakukan interpretasi dalam kerangka penelitian sosial.

Untuk menjaga validasi dan kredibilitas analisis, peneliti melakukan *rereading* terhadap data. Triangulasi sumber (antara platform dan artikel) serta refleksi kritis atas posisi subjektif peneliti. Hal ini dilakukan agar interpretasi terhadap tanda-tanda media tidak bersifat spekulatif, melainkan berdasarkan pada kerangka teori yang kokoh dan proses pembacaan data yang berulang.

Hasil dan Pembahasan

Representasi Kritik Terhadap Kekuasaan Dalam Video “Indonesia Gelap” Representasi Terhadap Kebijakan Pemerintah

Representasi dalam video “Indonesia Gelap” tidak berdiri di atas realitas objektif, melainkan merupakan hasil konstruksi makna yang dibentuk oleh kreator melalui narasi

visual, simbol, dan kutipan. Dalam video ini, berbagai unsur visual, narasi, dan simbol menyampaikan pesan bahwa negara sedang mengalami krisis, khususnya dalam hal keadilan, keberpihakan kebijakan, dan kesejahteraan rakyat. Kalimat pembuka “Indonesia sedang tidak baik-baik saja” menjadi penanda utama bahwa situasi negara dianggap tidak normal. Tayangan demonstrasi mahasiswa yang tetap berjalan di tengah hujan, spanduk dan poster berisi kritik tajam, serta partisipasi massa yang besar menunjukkan bahwa rakyat, terutama mahasiswa, secara aktif menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Tabel 1. Representasi Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah

Tema Representasi	Bentuk Representasi	Bukti Observasi (Narasi, Kutipan, Visual)	Makna (Konotatif)
Kritik terhadap kebijakan pemerintah	Narasi pembuka	“Indonesia sedang tidak baik-baik saja”	Situasi nasional genting, kritik terhadap keadilan sosial
	Visual demonstrasi	Cuplikan orasi, aksi hujan, ribuan peserta dari 30 organisasi, aksi hingga malam	Protes terbuka dan masif terhadap pemerintah
	Visual spanduk/pesan aksi	Slogan: “Belanja militer naik...”, “Sahkan UU Perampasan Aset”, dsb	Simbol ketidakpuasan dan tekanan politik dari rakyat
	Visual rapat dan pelantikan	Rapat dan pelantikan berlangsung saat demo besar	Pemerintah dianggap tidak peka terhadap aspirasi publik
	Visual aktivitas presiden pasca demo	Pertemuan dengan pejabat dan investor, tanpa respon demo	Rakyat merasa diabaikan
	Visual hubungan luar negeri	Pertemuan dengan pejabat Rusia, bahas alutsista	Fokus pemerintah dinilai lebih pada militer & luar negeri
	Narasi kritik kebijakan	Negara tidak berpihak pada rakyat”, “Tak diberi kesempatan bersuara”	Kritik langsung terhadap arah kebijakan
	Narasi tuntutan aksi	Evaluasi makan gratis, tolak UU bermasalah, dwi fungsi TNI, dll.	Tuntutan konkret dari keresahan masyarakat

Sumber: Data Observasi Video Indonesia Gelap Akun TikTok Voidotid

Kritik terhadap kebijakan pemerintah tergambar jelas dalam video ini. Tayangan pelantikan kepala daerah dan rapat-rapat pemerintahan yang disandingkan dengan demonstrasi besar menunjukkan bahwa pemerintah dianggap tidak peka terhadap aspirasi publik. Ketidakhadiran pernyataan langsung dari presiden pascaaksi membuat rakyat merasa diabaikan. Bahkan, narasi dalam video secara eksplisit menyebut bahwa “negara tidak lagi berpihak pada rakyat” dan “rakyat tidak diberi kesempatan untuk bersuara”.

Selain observasi terhadap video, peneliti juga memperkuat analisis dengan mengkaji isi artikel pemberitaan yang disematkan dalam unggahan akun Voidotid. Artikel tersebut menampilkan 13 tuntutan gerakan “Indonesia Gelap” secara lebih terstruktur, yang mencakup isu pendidikan, agraria, reforma birokrasi, evaluasi program pemerintah, serta revisi kebijakan hukum dan militer. Hal ini menunjukkan bahwa konten video didukung oleh narasi yang lebih luas dan mendalam melalui kanal artikel, menjadikan pesan politik yang disampaikan lebih terarah dan berbasis data.

Ungkapan verbal dan visual seperti “makan gratis dijanjikan, sekolah dikorbankan” juga muncul dalam video, menyiratkan ketimpangan antara janji pemerintah dan kenyataan yang di rasakan masyarakat.

Paparan Visual dan verbal dalam video ini mencerminkan proses encoding pesan ideologis oleh kreator video, sebagaimana dijelaskan Hall (1973), bahwa media berperan tidak hanya dalam menyampaikan realitas, tetapi dalam membentuknya melalui konstruksi simbolik. Kreator secara sadar mengkodekan ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan sosial dalam narasi visual dan verbal, dan simbolik yang ditampilkan secara representatif dan emosional.

Ungkapan seperti “makan gratis dijanjikan, sekolah di korbankan” dapat menggunakan pendekatan semiotika Barthes (1977), sebagai simbol yang menyimpan makna konotatif tentang kegagalan kebijakan publik dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Dibalik makna literalnya (denotatif), narasi tersebut membangun mitos ideologis tentang negara sebagai kekuatan hegemonik yang mengabaikan aspirasi rakyat kecil dan manipulasi persepsi publik melalui janji-janji populis.

Konten ini menampilkan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sebagai bentuk dominasi simbolik, dimana negara diposisikan sebagai entitas yang tidak lagi mewakili suara rakyat. Hal ini selaras dengan posisi *dominant-hegemonic* dalam teori *encoding/decoding* Hall, dimana produsen pesan menyusun makna untuk melawan narasi hegemonik negara.

Temuan ini memperluas kajian Akbar (2025), yang menganalisis pencitraan politik Anies Baswedan dalam TikTok. Jika Akbar menyoroti produksi simbol progresif oleh aktor politik, maka dalam penelitian ini, Voidotid memproduksi representasi krisis sosial sebagai bentuk perlawanan digital terhadap narasi negara yang dominan dan tidak responsif.

Simbol Perlawanan dalam Aksi Massa

Representasi dalam video “Indonesia Gelap” tidak hanya menyampaikan kritik terhadap kebijakan, tetapi juga membentuk simbol-simbol perlawanan kolektif melalui visualisasi aksi massa, orasi, dan ekspresi artistik dari para demonstran. Tayangan massa aksi yang berjalan di bawah hujan, simbolisasi warna hitam pada pakaian, serta poster dan selebaran yang menampilkan frasa-frasa seperti “Reformasi Dikorupsi” atau “Negara Gagal” membentuk atmosfer resistensi yang kuat. Keseluruhan narasi visual ini membangun kesan bahwa kekuatan rakyat tidak padam meskipun dihadapkan pada represi dan pengabaian.

Tabel 2. Representasi Simbol Perlawanan dalam Video

Tema Representasi	Bentuk Representasi	Bukti Observasi (Narasi, Kutipan, Visual)	Makna (Konotatif)
Simbol perlawanan	Narasi pembuka	“Indonesia sedang tidak baik-baik saja.”	Kesadaran krisis dan dorongan perlawanan

Visual simbol nasional	Garuda hitam dan teks “peringatan darurat” dari media asing	Kritik simbolik terhadap negara, kesan krisis nasional
Poster kritik kebijakan	“Miskinkan koruptor”, “Belanja militer naik...”, dll.	Keberanian kolektif melawan elite dan kebijakan
Tagar perlawanan	#KaburAjaDulu, #SaveKipKuliah, #TurunkanUKTPTN, dll.	Simbol solidaritas dan mobilisasi generasi muda
Visual kostum aksi	Pakaian hitam + tulisan kritik kekerasan aparat	Warna duka dan simbol perlawanan terhadap represi
Poster seruan aksi	Seruan nasional BEM SI dan aliansi sipil	Tanda perlawanan terorganisir secara luas
Wawancara mahasiswa	“Obat pahit itu adalah kritik...”	Simbol perjuangan damai yang idealistik
Video jurnalis ditangkap	Peliputan demo dibatasi, kritik warganet	Perlawanan terhadap represi informasi dan sensor

Sumber: Data Observasi Video Indonesia Gelap Akun TikTok Voidotid

Video “Indonesia Gelap” juga sarat akan simbol-simbol visual yang menandakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan. Salah satu representasi utamanya adalah tayangan lambang Garuda yang diubah menjadi warna hitam dengan latar tulisan “peringatan darurat”, yang menunjukkan situasi krisis nasional.

Visual lainnya menunjukkan demonstran mengenakan pakaian hitam serta terdapat pula tulisan kritik kekerasan aparat. Warna hitam digunakan secara konsisten dalam visual-visual aksi sebagai representasi suasana duka dan bentuk resistensi. Poster-poster aksi juga muncul, memuat slogan seperti “Miskinkan koruptor” dan “Belanja militer naik, rakyat tidak dilindungi” merupakan ungkapan langsung terhadap elit penguasa.

Selain elemen visual, aspek digital juga digunakan sebagai medium perlawanan. Tagar seperti #KaburAjaDulu, #DaruratPendidikan dan #SaveKipKuliah menjadi bagian dari narasi video maupun komentar warganet. Ini menunjukkan bahwa bentuk perlawanan tidak terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berlangsung dalam dunia digital, menandai adanya solidaritas horizontal antarwarga.

Berdasarkan paparan data tersebut simbol-simbol dalam video ini menunjukkan bahwa Voidotid melakukan proses encoding kritik Ideologis melalui pemilihan visual yang sarat makna konotatif. Tayangan Garuda Hitam dan tulisan “peringatan darurat” merupakan bentuk re-signifikasi simbol nasional sebagai penanda krisis. Dalam perspektif Hall (1997), ini adalah proses representasi dimana media tidak merefleksikan realitas, melainkan membentuknya secara ideologis.

Penggunaan pakaian Hitam bukan sekedar informasi literal (denotatif), tetapi membentuk konotasi suasana duka. Menurut Barthes (1977), makna konotatif ini dapat membentuk mitos bahwa negara sedang gagal dan masyarakat perlu mengambil alih

wacana publik. Dengan demikian, simbol hitam menjadi kode visual perlawanan terhadap dominasi kekuasaan negara.

Poster-poster dengan slogan tajam merupakan bagian dari framing Strategy (Syafrina, 2022), dimana kreator memilih elemen visual yang menekankan krisis dan ketegangan. Ini menciptakan narasi bahwa masyarakat sudah tidak lagi percaya pada sistem yang ada. Bahkan, tagar seperti #KaburAjaDulu berfungsi sebagai simbol digitalisasi resistensi, memperkuat apa yang disebut Wasilah et al. (2021) dan Baskoro et al. (2023) bahwa media sosial, khususnya TikTok, memainkan peran kunci dalam membentuk kesadaran politik generasi muda melalui simbolisme digital.

Perbandingan dengan studi Ramkita dan Muslim (2023), memperjelas posisi Voidotid sebagai *non-state actor* yang menggunakan simbol visual untuk membentuk oposisi terhadap wacana dominan negara. Berbeda dengan partai politik yang menekankan representasi institusional, Voidotid justru mengandalkan bahasa visual untuk menciptakan mitos krisis, yang disebarkan melalui algoritma TikTok dan solidaritas digital.

Dengan begitu, video ini menunjukkan bahwa simbol seperti Garuda hitam, pakaian aksi, dan poster bukan hanya ornamen visual, tetapi alat resistensi ideologis yang berfungsi menyamakan relasi kuasa dan menggugah kesadaran kolektif.

Penindasan Sosial dan Realitas Rakyat Kecil

Representasi dalam video “Indonesia Gelap” tidak hanya menampilkan ekspresi perlawanan terhadap elite kekuasaan, tetapi juga menggambarkan kondisi penindasan sosial dan kesenjangan yang dialami oleh rakyat kecil. Melalui visualisasi antrean warga miskin dalam mengakses layanan dasar seperti gas LPG, BBM, hingga BPJS, serta narasi yang menyoroti ketimpangan akses pendidikan, video ini membentuk konstruksi realitas bahwa negara gagal memenuhi kebutuhan paling mendasar warganya. Suasana krisis diperkuat oleh penggunaan narasi “Indonesia sedang tidak baik-baik saja”, yang secara eksplisit menyiratkan bahwa ketidakadilan tidak hanya hadir dalam ranah politik, tetapi juga dalam aspek sosial-ekonomi yang dialami oleh masyarakat bawah.

Tabel 3. Representasi Penindasan Sosial dan Realitas Rakyat Kecil

Tema Representasi	Bentuk Representasi	Bukti Observasi (Narasi, Kutipan, Visual)	Makna (Konotatif)
Penindasan sosial dan Realitas rakyat kecil	Narasi pembuka	“Indonesia sedang tidak baik-baik saja.”	Kesan krisis, ketidakadilan sosial bagi masyarakat bawah
	Visual antrian kebutuhan pokok	Foto warga miskin antri BPJS, gas, BBM dan tagar #KaburAjaDulu	Beban ekonomi berat dan ketimpangan layanan publik
	Narasi ketimpangan pendidikan	“Pendidikan diganggu”, “Makan gratis tapi pendidikan gak masuk akal”	Akses pendidikan tidak adil bagi kelompok miskin
	Visual demo saat hujan	Mahasiswa tetap berdemo meski diguyur hujan	Tekad rakyat dalam situasi sulit, simbol perlawanan sosial

Sumber: Data Observasi Video Indonesia Gelap Akun TikTok Voidotid

Penindasan sosial dan gambaran penderitaan rakyat kecil juga menjadi bagian penting dalam video ini. Ditampilkan berbagai visual warga yang antri BBM, gas LPG, dan layanan BPJS. Kondisi tersebut menggambarkan beban ekonomi masyarakat bawah yang kian berat. Tagar #KaburAjaDulu yang menyertai adegan tersebut memperkuat kesan putus asa sekaligus sindiran terhadap lemahnya kebijakan publik.

Narasi mahasiswa dalam video juga menyentuh persoalan pendidikan yang tidak merata. Kalimat “*makan gratis tapi pendidikan nggak masuk di akal*” menjadi representasi dari ketimpangan antara kebijakan populis dan kebutuhan dasar rakyat. Ketika makanan dijanjikan, tetapi pendidikan, yang merupakan hak dasar warga negara, tidak terpenuhi, maka ketimpangan struktural menjadi makin nyata.

Aksi demonstrasi yang tetap berlangsung di bawah hujan pun menjadi simbol keteguhan mahasiswa dan rakyat kecil untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Tayangan tersebut memperkuat gambaran bahwa dalam kondisi sulit sekalipun, perjuangan tetap dilanjutkan demi masa depan yang lebih adil.

Narasi tentang antrian BBM, gas, dan layanan kesehatan merupakan bentuk *agenda setting* dan *framing* oleh kreator, di mana isu-isu ini dipilih dan ditampilkan untuk menggambarkan ketimpangan sosial. Ini mendukung gagasan McCombs & Shaw bahwa media tidak netral, tetapi mempengaruhi prioritas isu publik (Syafrina, 2022).

Visual antrian rakyat miskin juga dapat dianalisis menggunakan kerangka semiotika Barthes (1977), secara denotatif, gambar tersebut hanyalah antrian warga. Namun secara konotatif, ia mencerminkan bentuk penelantaran negara terhadap rakyat kecil, menyimbol keterbatasan akses dan ketimpangan distribusi sumber daya. Konotasi ini, jika dibaca lebih dalam, menjadi representasi dari mitos bahwa kesejahteraan adalah tanggung jawab rakyat, bukan negara.

Lebih jauh, kritik terhadap ketimpangan pendidikan dalam video menunjukkan bagaimana kebijakan populis disoroti sebagai alat pengalihan isu. Kalimat “makan dijanjikan, pendidikan dikorbankan” bukan hanya kritik verbal, tetapi konstruksi simbolik yang menunjukkan kegagalan struktural negara dalam menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Pemaparan ini menambah dimensi baru dari studi Juleha et al. (2024) yang membahas media sosial sebagai ruang opini publik. Penelitian ini memperluas ruang lingkup dengan menunjukkan bahwa representasi kesenjangan sosial dalam konten digital juga dapat menjadi alat mobilisasi emosi kolektif terhadap kebijakan negara. Sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai subjek aktif dalam wacana politik.

Krisis Pendidikan dalam Representasi Kritik terhadap Kekuasaan

Dalam video “Indonesia Gelap”, krisis pendidikan menjadi salah satu isu sentral yang diangkat secara eksplisit. Isu ini dimunculkan baik melalui narasi, visualisasi massa aksi mahasiswa, maupun kutipan-kutipan yang menyoroti ketimpangan dan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Narasi seperti “makan dijanjikan, sekolah dikorbankan” dan “pendidikan diganggu” menjadi bentuk kritik terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan intelektual masyarakat, terutama generasi muda. Aksi massa mahasiswa yang konsisten turun ke jalan dalam situasi tidak ideal (hujan, malam hari, tanpa perlindungan negara) menggambarkan keresahan yang mendalam terhadap sistem pendidikan yang dianggap dikesampingkan.

Tabel 4. Representasi Pesan Sosial-Politik Tema Krisis Pendidikan

Tema Representasi	Bentuk Representasi	Bukti Observasi (Narasi, Kutipan, Visual)	Makna (Konotatif)
Krisis pendidikan	Tagar digital	#DaruratPendidikan, #SaveKipKuliah, #TurunkanUKTPTN	Keresahan kolektif terhadap sistem pendidikan tinggi dan biaya
	Poster & spanduk aksi	“Makan gratis tapi pendidikan gak masuk akal”, “Sekolah dikorbankan...”	Kritik terhadap ketimpangan prioritas kebijakan negara
	Narasi BEM SI	“Pendidikan tinggi adalah rumah kami yang sedang diganggu”	Pendidikan dipandang sebagai hak dasar yang terancam
	Wawancara & tuntutan aksi	Kritik naiknya UKT, ketidakjelasan kebijakan	Beban pendidikan semakin berat tanpa kejelasan kebijakan publik

Sumber: Data Observasi Video Indonesia Gelap Akun TikTok Voidotid

Krisis pendidikan tergambar dalam berbagai elemen visual dan verbal yang dihadirkan dalam video. Tagar seperti *#SaveKipKuliah* dan *#TurunkanUKTPTN* memperlihatkan keresahan mahasiswa terhadap mahal biaya kuliah. Poster aksi seperti “*Sekolah dikorbankan, masa depan dihancurkan*” dan pernyataan dari Ketua BEM SI bahwa “*Pendidikan tinggi adalah rumah yang sedang diganggu*” menggambarkan pendidikan sebagai pilar penting yang sedang terancam. Dalam berbagai wawancara, mahasiswa juga mengkritisi kebijakan kenaikan UKT yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

Pesan-pesan seperti “*Sekolah dikorbankan, masa depan dihancurkan*” mengandung makna konotatif bahwa pendidikan bukan lagi menjadi jembatan menuju kemajuan, melainkan menjadi korban dari ketidakadilan sistemik. Dalam semiotika Barthes (1977), spanduk dan tagar ini dapat dibaca sebagai tanda-tanda yang menyampaikan mitos, yakni bahwa negara telah gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan pendidikan yang layak. Selain itu, pesan-pesan ini juga merupakan bentuk *encoding* dari krisis pendidikan, dan secara strategis menggunakan *tagar* sebagai sarana sirkulasi wacana digital. Dalam kerangka Hall (1973), ini adalah bentuk produksi makna yang mengarahkan audiens untuk mendekode secara kritis isu pendidikan.

Sementara itu, Penggunaan narasi “*Rumah kita diganggu*” menunjukkan metafora yang kuat sebagai representasi identitas kolektif mahasiswa (Hall, 1997). Pendidikan direpresentasikan sebagai hak yang sedang direbut, memperkuat narasi ruang publik digital tempat artikulasi politik terjadi (Habermas, 1989).

Penekanan pada isu pendidikan di sini menunjukkan perluasan dari penelitian Juleha et al. (2024), yang menyoroti partisipasi digital dalam isu politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa isu pendidikan pun mampu memicu gerakan digital besar dengan muatan emosi, solidaritas, dan tuntutan konkret terhadap negara. Dengan demikian, video “Indonesia Gelap” tidak hanya mendokumentasikan protes, tetapi juga mengkonstruksi pendidikan sebagai isu strategis dalam wacana perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Penolakan terhadap Militerisasi Dalam Representasi Visual

Representasi dalam video “Indonesia Gelap” juga memperlihatkan kekhawatiran publik terhadap kembalinya pengaruh militer dalam ranah sipil. Tayangan aparat bersenjata, kegiatan militer bersama kepala daerah, serta narasi mahasiswa yang menolak Dwi Fungsi TNI menegaskan bahwa isu militerisasi dianggap sebagai ancaman nyata terhadap demokrasi. Dalam konteks ini, video tidak hanya menampilkan simbol represif, tetapi juga memperkuat resistensi publik terhadap dominasi kekuasaan yang melibatkan militer.

Tabel 5. Representasi Pesan Sosial-Politik Tema Penolakan Militerisasi

Tema Representasi	Bentuk Representasi	Bukti Observasi (Narasi, Kutipan, Visual)	Makna (Konotatif)
Penolakan militerisasi	Poster & tuntutan aksi	Salah satu dari 9 tuntutan: “Tolak Dwi Fungsi TNI”	Kritik terhadap keterlibatan militer dalam urusan sipil
	Visual kegiatan militer	Tayangan retreat kepala daerah dengan militer pasca-demo	Kesan kedekatan kekuasaan sipil dengan militer
	Wawancara mahasiswa	“RUU Dwi Fungsi TNI... pengkhianatan terhadap reformasi”	Penolakan terhadap kebijakan yang dianggap anti-demokrasi
	Visual demonstrasi	Barisan aparat lengkap, pakaian hitam demonstran	Simbol ketegangan dan perlawanan terhadap dominasi militer

Sumber: Data Observasi Video Indonesia Gelap Akun TikTok Voidotid

Isu penolakan terhadap militerisasi turut mendapat perhatian dalam video ini. Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah menolak kembali berlakunya Dwi Fungsi TNI. Tayangan kegiatan militer bersama kepala daerah usai aksi demo menimbulkan kesan bahwa kekuasaan sipil semakin dekat dengan militer. Mahasiswa menyebut hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Visual barisan aparat dan pakaian hitam demonstran mempertegas nuansa perlawanan terhadap simbol kekuasaan yang menakutkan dan represif. Poster-poster aksi yang menyuarakan pesan seperti “Hapus Dwi Fungsi TNI” dan “Rakyat bukan musuh negara” menjadi bentuk ekspresi perlawanan yang gamblang terhadap dominasi kekuasaan militeristik dalam ruang sipil.

Representasi visual dan verbal dalam video ini merupakan bentuk framing yang disengaja oleh kreator untuk membingkai militer sebagai aktor ancaman terhadap demokrasi sipil. Framing ini sejalan dengan konsep framing media dalam kajian komunikasi, yang menurut Syafrina (2022), menunjukkan bagaimana media mengorganisasi dan menonjolkan realitas sosial-politik tertentu untuk memengaruhi persepsi publik.

Dalam perspektif representasi Hall (1997), visual kegiatan militer bersama kepala daerah, serta narasi penolakan Dwi Fungsi TNI, merupakan konstruksi identitas musuh politik. Kreator video menyusun narasi yang menempatkan militer sebagai yang lain

yang mengganggu jalannya demokrasi. Representasi ini mempertegas adanya relasi kuasa antara rakyat dan negara yang tidak lagi setara, dimana alat kekuasaan digunakan untuk menekan aspirasi sipil.

Sedangkan Pakaian hitam demonstran sebagai simbol dapat ditafsirkan sebagai kode visual untuk perlawanan, sesuai dengan teori Barthes (1977), Warna gelap secara denotatif mungkin hanya simbol formal, tetapi secara konotatif menjadi lambang kesedihan, perlawanan, dan krisis demokrasi. Barisan aparat yang berjaga dengan senjata tidak hanya menunjukkan kekuatan negara, tetapi juga menandakan ketakutan dan represi terhadap rakyat.

Simbol-simbol ini berfungsi sebagai mitos dalam konteks Barthes, yaitu menyamakan realitas dominasi kekuasaan seolah wajar demi stabilitas. Ketika negara menampilkan kekuatan militer diruang publik, ia tidak hanya mengontrol tubuh warga, tetapi juga makna mengonstruksi keamanan sebagai alasan utama, padahal sebenarnya membungkam kritik.

Temuan ini juga memperluas penelitian dari Akbar (2025) yang menyoroti simbol kepemimpinan progresif di media sosial, berbeda dari pendekatan simbol afirmatif oleh figur politik, dalam konteks video “Indonesia Gelap”, simbol digunakan oleh *non-state actors* untuk merepresentasikan resistensi. Ini menggarisbawahi bahwa media sosial kini juga menjadi area penting bagi oposisi sipil terhadap narasi dominan negara.

Mobilisasi Digital dan Internasionalisasi Isu

Perlawanan dalam video “Indonesia Gelap” tidak hanya terbatas pada ruang fisik seperti demonstrasi jalanan, tetapi diperluas ke dalam ranah digital. Media sosial direpresentasikan sebagai medan baru perlawanan, di mana pesan-pesan kritik terhadap kekuasaan disebarluaskan dan dikonsolidasikan secara masif oleh masyarakat. Dalam konteks ini, TikTok tidak hanya berfungsi sebagai platform distribusi konten, tetapi juga sebagai ruang artikulasi opini publik, solidaritas, dan gerakan kolektif yang melintasi batas geografis dan politik.

Tabel 6. Representasi Mobilisasi Digital dan Internasionalisasi Isu

Tema Representasi	Bentuk Representasi	Bukti Observasi (Narasi, Kutipan, Visual)	Makna (Konotatif)
Mobilisasi digital	Tagar aksi di media sosial	#IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu, #DaruratPendidikan, dll.	Media sosial jadi alat utama menyatukan kritik publik
	Unggahan akun publik	Gambar, teks kritik, ajakan aksi dari @anonim5-@anonim7	Partisipasi luas tanpa hadir fisik, kreativitas kolektif
	Poster digital seruan aksi	Ajakan aksi nasional oleh BEM SI di Instagram	Seruan digital efektif memobilisasi massa
	Viralitas & pemberitaan asing	Tagar viral, media asing seperti VOI mengangkat isu	Isu lokal mendapat sorotan global berkat digitalisasi
	Komentar warganet	Screenshot respons soal jurnalis asing & tagar	Media sosial sebagai ruang ekspresi dan kritik publik

Internasiona lisasi isu	Cuplikan & komentar tentang media asing Narasi viral tagar	The Straits Times, TaiwanPlus, komentar publik	Suara digital rakyat menjangkau dunia, beri tekanan global
	Komentar digital warganet	“Indonesia Gelap mendadak viral hingga mendunia” (dalam video pembuka) Screenshot komentar tentang tagar & media asing	Isu lokal menembus batas negara berkat kekuatan digital Kesadaran rakyat bahwa suara mereka menjangkau dunia & bisa memberi tekanan diplomatis

Sumber: Data Observasi Video Indonesia Gelap Akun TikTok Voidotid

Selain itu, video ini memperlihatkan bagaimana perlawanan yang ditampilkan dalam video “Indonesia Gelap” tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga berkembang luas melalui media sosial. Mobilisasi digital menjadi kekuatan utama dalam menyebarluaskan pesan-pesan kritik terhadap pemerintah. Penyebaran tagar-tagar seperti *#IndonesiaGelap*, *#KaburAjaDulu*, *#DaruratPendidikan*, dan *#SaveKipKuliah* secara masif di berbagai *platform* digital menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang utama untuk menyuarakan ketidakpuasan publik dan membangun solidaritas.

Unggahan dari akun-akun publik seperti *@anonim5*, *@anonim6*, dan *@anonim7* berisi gambar, kutipan kritis, dan ajakan aksi yang dikemas secara visual dan kreatif, memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan sosial tanpa harus hadir secara langsung di lokasi aksi. Poster digital yang disebar oleh BEM SI dan akun aktivisme lainnya berisi seruan aksi nasional terbuka yang terjadwal dengan rapi, menunjukkan bahwa koordinasi massa kini dapat dilakukan secara cepat dan luas melalui sarana daring.

Selain di tingkat nasional, video ini menyebutkan bahwa *tagar* “Indonesia Gelap” menjadi viral secara global, dan ini diperkuat oleh pemberitaan media asing seperti *The Straits Times*, *TaiwanPlus*, dan *The Star*. Bahkan komentar-komentar warganet yang menanggapi penangkapan jurnalis asing menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya peliputan independen dan dampak diplomatik dari gerakan digital. Penyebaran kritik melalui media sosial telah melampaui batas-batas negara, memperlihatkan bahwa suara rakyat Indonesia kini tidak hanya terdengar di dalam negeri, tetapi juga mendapat *respons* di tingkat global.

Berdasarkan data tersebut, Tagar viral dan partisipasi digital masif merupakan perwujudan dari konsep ruang publik digital sebagaimana dikemukakan oleh Habermas (1989) dan diperkuat oleh Surokim (2017), di mana media sosial berfungsi sebagai kanal deliberasi serta mobilisasi opini publik secara horizontal dan partisipatif.

Menurut Fachlevi et al. (2024), publik kini memanfaatkan media sosial untuk merespons dan mengartikulasikan perubahan sosial yang mereka alami. Selaras dengan itu, Kementerian Perdagangan RI (2014), menegaskan bahwa pengguna media sosial juga memiliki kemampuan untuk menjadi pencipta sekaligus penyebar informasi yang membentuk makna secara partisipatif. Dalam konteks ini, proses *encoding* pesan tidak hanya terjadi pada level kreator seperti *@Voidotid*, tetapi juga direproduksi secara aktif

oleh publik melalui aktivitas berbagi (*sharing*), komentar, dan penggunaan tagar, membentuk jaringan sematik yang memperluas dampak wacana perlawanan.

Tagar-tagar viral, poster digital, dan komentar publik menjadi representasi dari kode visual dan simbolik dalam perspektif semiotika Barthes (1977), di mana setiap bentuk konten digital menyiratkan makna konotatif berupa perlawanan terhadap kekuasaan, solidaritas sipil, tuntutan akan transparansi serta keadilan. Tagar seperti “#SaveKipKuliah” tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi menciptakan mitos tentang negara yang gagal menjamin akses pendidikan, sementara poster digital menjadi media framing untuk mempertegas urgensi gerakan sosial.

Selain itu, aspek internasionalisasi isu menegaskan bahwa gerakan digital tidak lagi dibatasi oleh batas negara. Representasi perlawanan yang viral dan mendapat liputan dari media asing membuktikan bahwa TikTok telah menjadi arena representasi politik yang transnasional. Hal ini memperluas temuan Ramkita dan Muslim (2023), yang menekankan pentingnya media sosial sebagai alat komunikasi partai politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hanya entitas formal seperti partai, tetapi juga gerakan sipil dan aktor independen seperti @Voidotid mampu menggunakan media digital untuk memperluas jangkauan wacana politik hingga ke ranah internasional. Ini membuktikan bahwa mobilisasi digital telah menjadi alat perlawanan yang efektif dan transnasional dalam memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak sipil.

Berdasarkan seluruh temuan, dapat disimpulkan bahwa akun TikTok @Voidotid melalui video “Indonesia Gelap” berhasil merepresentasikan pesan-pesan sosial-politik secara kuat dan kritis, serta menyentuh realitas masyarakat Indonesia saat ini. Video ini menjadi medium ekspresi keresahan publik terhadap ketidakadilan, ketimpangan kebijakan, dan lemahnya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.

Representasi kritik tersebut terwujud dalam enam tema utama, yakni: 1) kritik terhadap kebijakan pemerintah; 2) Simbol-simbol perlawanan; 3) Gambaran penderitaan rakyat; 4) krisis pendidikan; 5) penolakan terhadap militerisasi; 6) mobilisasi digital dan internasionalisasi isu.

Seluruhnya disampaikan melalui perpaduan narasi, visual, simbol, dan kutipan aktual yang sarat makna. Penggunaan elemen seperti aksi demonstrasi, lambang negara yang digelapkan, pakaian hitam, serta *tagar-tagar* viral menjadi bentuk ekspresi yang efektif dalam menyampaikan perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak berpihak.

Lebih dari sekadar media kritik, video ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial telah menjadi ruang perlawanan baru yang mendorong solidaritas digital, membangun kesadaran publik, dan menjangkau perhatian dunia internasional. Viralitas *tagar* seperti #IndonesiaGelap menunjukkan bahwa media digital mampu mengangkat isu lokal menjadi gerakan transnasional yang mendapat *respons* luas.

Dengan demikian, @Voidotid tidak hanya berfungsi sebagai pembuat konten, tetapi juga sebagai aktor yang memediasi suara kolektif masyarakat. Video “Indonesia Gelap” menjadi bukti bahwa *platform* digital seperti TikTok mampu memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kritis, menyuarakan oposisi terhadap dominasi kekuasaan, serta mendorong terjadinya gerakan sosial yang lebih luas dan partisipatif.

Respons Publik terhadap Video "Indonesia Gelap"

Video “Indonesia Gelap” yang diunggah oleh akun TikTok @Voidotid menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Respons ini terlihat dari banyaknya komentar yang muncul di kolom tanggapan, baik di TikTok maupun platform lain seperti YouTube. Komentar-

komentar tersebut memperlihatkan bahwa publik tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi aktif terlibat dalam menilai, mendukung, menyanggah, ataupun mempertanyakan isi video. Untuk memahami dinamika ini lebih dalam, komentar-komentar publik dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan pola sikap terhadap isi video.

Respons komentar menunjukkan bahwa *audiens* menerima sepenuhnya narasi negara atau status quo, serta mendukung kebijakan yang tengah dibahas. Contohnya terlihat pada komentar dari akun @anonim8 yang menyatakan “Rakyat baik-baik saja.”. Kalimat ini mencerminkan penerimaan utuh terhadap kondisi negara dan menyangkal adanya krisis seperti yang disoroti dalam video. Demikian pula, komentar dari @anonim9 berbunyi, “Tetap sahkan saya dukung sepenuhnya RUU TNI hidup TNI rakyat bersama NKRI dan TNI,” yang secara eksplisit mendukung kebijakan pemerintah dan memperkuat posisi kekuasaan negara.

Pada sisi lain, *respons* komentar *audiens* memperlihatkan menolak secara tegas narasi negara dan sebaliknya mendukung isi kritik dalam video. Akun @anonim1, misalnya, menulis:

“Ini akibat negara sudah dikuasai oleh para politisi bukan oleh para negarawan. Seorang presiden seharusnya sudah menjadi milik semua partai dan rakyat.”

Komentar ini tidak hanya menolak kebijakan tertentu, tetapi juga menyuarakan kritik sistemik terhadap kondisi politik nasional. Serupa dengan itu, komentar dari @anonim2 yang singkat namun tegas, “Tolak RUU TNI”, memperlihatkan bentuk penolakan langsung terhadap kebijakan yang dikritik dalam video. Sementara akun @anonim3 bahkan menyampaikan komentar yang lebih ekstrem, “Sebaiknya singkirkan Prabowo dan Gibran. Prabowo itu bekerja untuk oligarki China,” yang menunjukkan posisi oposisi radikal.

Pola *respons* komentar *audiens* juga sebagian menerima pesan dari video, namun menafsirkannya sesuai perspektif pribadi. Misalnya, komentar dari akun @anonim10 menyampaikan:

“Saya rakyat Indonesia baik-baik saja. Yang gelap itu anggaran bapak ibunya dipotong sama Prabowo.”

Di sini, *audiens* menyepakati adanya masalah, tetapi membatasi kritik hanya pada persoalan anggaran, bukan terhadap negara secara keseluruhan. Ini menunjukkan adanya penerimaan bersyarat terhadap pesan dalam video.

Di luar komentar, keterlibatan *audiens* dalam bentuk *likes* 232, *share* 68, dan *save* 51 juga menjadi indikator penting. Tindakan membagikan dan menyimpan video menunjukkan bahwa *audiens* tidak hanya menonton secara pasif, tetapi juga berpartisipasi dalam penyebaran pesan kritik tersebut.

Untuk memperkaya hasil analisis terhadap video “Indonesia Gelap” dari akun @Voidotid di platform TikTok, peneliti juga melakukan observasi terhadap video yang sama yang diunggah di kanal YouTube dengan nama akun serupa. Analisis terhadap komentar-komentar *audiens* di kedua *platform* dilakukan guna menguji konsistensi makna dan *respons* publik, serta sebagai bentuk triangulasi sumber data.

Hasil observasi pada YouTube menunjukkan bahwa sebagian besar komentar berada pada kategori menolak secara tegas narasi negara dan sebaliknya mendukung isi kritik dalam video. *Audiens* secara terbuka menyatakan kritik terhadap pemerintah,

kebijakan negara, serta mengungkapkan dukungan terhadap gerakan mahasiswa. Contohnya, komentar dari akun @*anonim11* menyatakan:

"Sebagai rakyat biasa mendukung setiap gerakan mahasiswa, para tokoh dan setiap ilmuwan demi untuk negara,"

Komentar tersebut menunjukkan solidaritas terhadap kelompok kritis dan penolakan terhadap kekuasaan dominan. Bahkan, terdapat komentar yang lebih *ekstrem*, seperti dari akun @*anonim3* yang menyatakan:

"Sebaiknya singkirkan Prabowo dan Gibran... Prabowo itu bekerja untuk oligarki China,"

Komentar ini menunjukkan posisi penolakan secara tegas dan radikal dengan unsur rasisme dan konspirasi. Dibandingkan dengan TikTok, komentar di YouTube cenderung lebih panjang, reflektif, dan argumentatif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik *platform* YouTube yang memberi ruang lebih luas untuk penulisan komentar.

Adapun *respons* dominan yang membela pemerintah juga ditemukan di YouTube, misalnya komentar dari @*anonim12* yang menyatakan, *"Indonesia terang cerah... presiden ingin memajukan Indonesia."* Ini menunjukkan bahwa narasi negara tetap mendapat dukungan, walau jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan *respons* penolakan. Menariknya, pola komentar *audiens* yang menerima pesan dari video, namun menafsirkannya sesuai perspektif pribadi juga cukup terlihat di YouTube. Komentar seperti yang ditulis oleh @*anonim13* mencerminkan hal ini:

"Masih ada harapan untuk Indonesia terang bila Bapak Prabowo bersama rakyat."

Audiens dalam kategori ini tidak sepenuhnya menolak sistem, tetapi berharap akan adanya perubahan dan pembenahan dalam pemerintahan saat ini. Sikap ini mengindikasikan adanya negosiasi makna dari pesan video "Indonesia Gelap," di mana *audiens* mencoba menyesuaikan pesan dengan pandangan pribadi mereka. Dengan demikian, penggunaan data sekunder dari YouTube memperkuat temuan utama dari TikTok, bahwa video "Indonesia Gelap" memicu *respons* publik yang luas dan bervariasi.

Respon-respon publik yang terbagi dalam sikap menerima, menegosiasikan, dan menolak dapat dibaca melalui lensa teori *encoding/decoding* Hall (1973). Dalam konteks ini, kreator video berperan sebagai *encoder* yang menyisipkan kritik terhadap kekuasaan melalui narasi, visual, dan simbol-simbol digital. Sementara itu, *audiens* bertindak sebagai *decoder* yang memaknai isi video berdasarkan latar sosial, ideologis, dan pengalaman masing-masing. Penonton dengan posisi dominan-hegemonik menerima dan memperkuat pesan video, penonton dengan posisi negosiasi mengakui sebagian pesan namun tetap mempertanyakan aspek tertentu, sedangkan penonton oposisi menolak isi video dengan argumentasi tandingan.

Menurut Purwaningsih & Sabardila (2020), interaksi semacam ini menunjukkan bahwa ruang digital telah melahirkan praktik *decoding* aktif yang memungkinkan masyarakat untuk menegosiasikan pesan dominan. Komentar-komentar dari *audiens* tidak sekadar menjadi refleksi emosi sesaat, tetapi berperan sebagai artikulasi sikap politik yang terwujud secara terbuka di ruang publik digital.

Lebih jauh, fenomena ini selaras dengan konsep ruang publik digital sebagaimana dijelaskan oleh Habermas (1989). Platform seperti TikTok dan YouTube tidak lagi sekadar menjadi media hiburan, tetapi telah berkembang menjadi arena deliberatif di mana opini publik mengenai kebijakan negara, kekuasaan politik, dan ketidakadilan sosial dibentuk, dinegosiasikan, dan dipertentangkan secara partisipatif. Dalam hal ini, respons publik terhadap video “Indonesia Gelap” mencerminkan dinamika diskursus digital yang menggambarkan posisi masyarakat terhadap dominasi negara.

Temuan ini juga memperluas hasil kajian Juleha et al. (2024) yang menekankan bahwa media sosial bukan hanya ruang berekspresi, tetapi juga tempat produksi wacana politik alternatif oleh masyarakat sipil. Jika sebelumnya studi Juleha menyoroiti bentuk partisipasi dalam isu elektoral, maka penelitian ini menunjukkan bahwa kritik terhadap kekuasaan, seperti isu pendidikan, militerisasi, dan krisis ekonomi, juga dapat dimobilisasi melalui respons-respons digital yang muncul secara organik.

Senada dengan itu, Akbar (2025) menggarisbawahi bagaimana TikTok menjadi platform bagi figur politik untuk membentuk citra positif. Dalam konteks ini, akun seperti @Voidotid justru menggunakan TikTok untuk membentuk narasi oposisi dan membongkar ketimpangan kuasa melalui pendekatan visual, emosional, dan partisipatif.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa video “Indonesia Gelap” dari akun TikTok @Voidotid bukan sekadar karya konten visual, tetapi sebuah konstruksi kritik terhadap kekuasaan yang dirancang dengan strategi simbolik dan narasi yang kuat. Video ini tidak hanya menyajikan fakta atau informasi, tetapi juga menyusun realitas alternatif tentang negara yang gagal memenuhi aspirasi rakyatnya. Representasi ini membongkar mitos dominan tentang stabilitas dan kemajuan nasional dengan menunjukkan kenyataan ketimpangan sosial, krisis pendidikan, pengabaian terhadap rakyat kecil, serta meningkatnya pengaruh militer dalam ranah sipil.

Enam tema utama yang diangkat dalam video yakni kritik terhadap kebijakan pemerintah, simbol perlawanan, penderitaan rakyat, krisis pendidikan, penolakan militerisasi, serta mobilisasi digital dan internasionalisasi isu, menjadi bingkai kritik kolektif yang dirangkai secara visual dan naratif. Representasi semacam ini memperlihatkan bahwa media digital kini mampu menjalankan fungsi kontra-hegemonik, yakni melawan dominasi makna yang diproduksi negara melalui media arus utama. Dalam konteks ini, video “Indonesia Gelap” bersifat ideologis dan berperan sebagai media oposisi sipil terhadap narasi kekuasaan.

Respons publik yang muncul pun menunjukkan dinamika *decoding* yang kompleks. TikTok dan YouTube menjadi ruang publik digital tempat berlangsungnya kontestasi makna antara dukungan, negosiasi, dan penolakan terhadap wacana negara. Hal ini memperkuat temuan bahwa media sosial bukan hanya medium hiburan, tetapi juga arena produksi wacana politik alternatif oleh masyarakat sipil. Dengan demikian, video ini memperluas peran TikTok sebagai *platform* yang mampu menjembatani ekspresi lokal dengan solidaritas global.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori representasi dan *decoding* dalam komunikasi politik digital. Pertama, penelitian ini menunjukkan bagaimana representasi visual di TikTok dapat dikaji secara mendalam menggunakan teori semiotika Barthes dan *encoding/decoding* Hall, terutama dalam membedah makna simbolik dan ideologis dari konten video. Kedua,

penelitian ini menambahkan perspektif baru dalam studi media politik bahwa aktor non-partisan seperti @Voidotid dapat menjadi agen penting dalam menciptakan perlawanan digital yang efektif, lintas batas, dan mampu mengartikulasikan wacana publik yang berbeda dari narasi resmi negara.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bentuk dokumenter advokatif di era media sosial. Video “Indonesia Gelap” memperlihatkan bahwa dokumenter tidak harus berbentuk film panjang atau disiarkan di televisi, Namun media sosial juga memungkinkan dokumenter berbasis visual pendek yang padat, emosional, dan efektif dalam membangun kesadaran kolektif.

Namun demikian, studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Meskipun analisis utama difokuskan pada satu video berjudul “Indonesia Gelap” dari akun TikTok @Voidotid, data juga diperkuat dengan observasi terhadap versi video di YouTube serta artikel pemberitaan dari kanal VOI.id sebagai sumber triangulasi. Kendati demikian, fokus pada satu kasus tetap membatasi generalisasi terhadap praktik representasi kritik kekuasaan di media sosial secara lebih luas. Selain itu, interpretasi terhadap simbol dan narasi bersifat kualitatif dan dipengaruhi oleh posisi ideologis peneliti, meskipun telah diupayakan objektivitas melalui pembacaan berulang dan konfirmasi lintas *platform*.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar pendekatan serupa diterapkan pada objek yang lebih beragam seperti akun kreator lainnya, *platform* berbeda, atau perbandingan lintas waktu dan lokasi. Selain itu, penting pula untuk mengkaji lebih dalam relasi antara produksi konten digital dan dampak nyata dalam perubahan sosial atau kebijakan publik, guna memperkuat pemahaman tentang kekuatan dokumenter advokatif di era digital.

Referensi

- Abdillah, L. A. (2022). *Peran Media Sosial Modern* (A. Murty (ed.)). Palembang: Bening. www.bening-mediapublishing.com
- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed., Vol. 1). Makasar: Syakir Media Press.
- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, A. F., Akbar, J. S., Lubis, M. A., MARYATI, I., Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulangi, R. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif* (Irmayanti (ed.); 1st ed.). Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Akbar, A. F. (2025). *Representasi Citra Politik Anies Baswedan Sebagai Calon Presiden Indonesia Pada Pilpres 2024 di TikTok*. Universitas Islam NEgeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Albarzand, A. F. (2024). Peran Tiktok Sebagai Media Komunikasi Politik Bagi Generasi Milenial (Studi Kasus Pada Karyawan Duta Lampung Tahun 2024). *Jurnal Professional*, 11(2), 511–516.
- Annur, C. M. (2023, November 22). *Indonesia Punya Pengguna TikTok Terbanyak ke-2 di Dunia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/e648305dcaf6b0f/indonesia->
- Barthes, R. (1977). *Elements of Semiology* (A. Lavers & C. Smith, Trans.). New York: Hill and Wang.
- Baskoro, F., Wijaya, A. Y., & Asrori, M. Z. (2023). *Literasi Digital Untuk Remaja* (A. Masruroh (ed.); 1st ed.). Bandung: Widina Media Utama. www.freepik.com
- Fachlevi, S., Unde, A. A., & Hasrullah. (2024). Analisis Sentimen Publik pada Tagar #KawalPutusanMK di Media Sosial X. *Syntax Admiration*, 5(10), 4232–4241. <https://doi.org/doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1691>

- Firdaus, S., Naila, N., Pramesti, A. D., Sari, C. K., Azzahra, D. F., & Angela, D. (2023). Tiktok Sebagai Media Sosial dalam Melakukan Kritik terhadap Pembangunan di Lampung. *Indonesian Journal of Social Development*, 1(2). <https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1882>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (T. Burger, Trans.)*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hall, S. (1973). *encoding-Decoding in the television discourse (7; CCCS Stencilled Paper Series)*. https://ia600401.us.archive.org/6/items/bokss/SH-Coding_text.pdf
- Hall, S. (1997). *Representation : cultural representations and signifying practices*. London: Sage Publications & The Open University.
- Hasanah, N. (2022). Desain Observasi. In Y. Novita (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed., Vol. 1, pp. 1–206). Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Juleha, J., Yuniar, J., & Marsuki, N. R. (2024). Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Partisipasi Politik Era Digital. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 38–45. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.951>
- Kamindang, I., & Amijaya, M. (2024). TikTok Sebagai Komunikasi Politik Aktor Partai Politik Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i1.151>
- Kementerian Perdagangan RI. (2014). *Panduan optimalisasi media sosial untuk Kementerian Perdagangan RI* (H. W. Satria & L. H. Arifin (eds.); 1st ed.). Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan RI.
- Mouw, E. (2022). Teknik Analisis Dalam Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed., Vol. 1, pp. 1–206). Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Purwaningsih, D. A., & Sabardila, A. (2020). Respons Netizen terhadap Caption Publik Figur di Instagram. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(2), 213–225. <https://doi.org/doi.org/10.30651/lf.v4i2.5098>
- Ramkita, M., & Muslim. (2023). Pengguna Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik (Studi Kasus Sosial Media Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan). *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(6), 538–546. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1009>
- Surokim. (2017). Internet, Arus Bawah, dan Perubahan Sosial Madura. In Surokim (Ed.), *Internet Media Sosial & Perubahan Sosial Di Madura* (1st ed., Vol. 1, pp. 10–18). Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB UTM dan Aspikom.
- Syafrina, A. E. (2022). *Komunikasi Massa* (R. Kusumawati (ed.); 1st ed.). Sumedang: CV. Mega Press Nusantara. www.megapress.co.id
- Wasilah, N., Latief, R., & Hatta, H. (2021). Representasi Pesan Politik Generasi Milenial Dalam Program E-Talk Show TV One. *Jurnal Mercusuar*, 2(2), 140–156.
- Wibowo, S. H. (2023). Konsep Teknologi Digital. In D. P. Sari (Ed.), *Teknologi Digital Di Era Modern* (1st ed., Vol. 1, pp. 1–173). Sumatra Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id